



**PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
BERDASARKAN PERSPEKTIF TATA RUANG DI BALI**

**Oleh:
I Putu Gede Parma, S.St. Par.,M.Par.
NIP. 197708192002121003**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2013**

Abstrak

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin *sustainable development* guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk memaparkan dukungan penataan ruang dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia khususnya Bali. Dalam pembahasan terdapat beberapa landasan pemikiran dan tinjauan tata ruang di Bali yang dipergunakan sebagai dasar dalam pembahasan. Kemudian terdapat beberapa inovasi pengembangan pariwisata di Bali sebagai penunjang pembahasan.

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa beberapa kebijakan dan peraturan seperti Tri Hita Karana sangat penting untuk diperhatikan, karena dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata dilihat dari perspektif tata ruang. Saran yang bisa diberikan adalah adanya kerjasama pada berbagai pihak swasta, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata di Bali.

Kata Kunci: Tata Ruang, Pariwisata Berkelanjutan

Abstract

In the development of tourism activities, it is necessary to arrangements that ensure the allocation of space in order to achieve sustainable development welfare. This is in accordance with the basic principles of spatial planning which is aimed at improving the use of natural resources and artificial resources in efficient, effective, and appropriate to improve the quality of human resources, realize the protection function space and to prevent and cope with negative impacts the environment, and create the balanced interests of prosperity and security. Accordingly, this paper aims to describe the spatial support in the development of sustainable tourism in Indonesia, especially Bali. In the discussion there is some rationale and an overview of Bali layout used as a basis for discussion. Then there are some innovative development of tourism in Bali to support the discussion. From this discussion it can be concluded that some of the policies and regulations such as Tri Hita Karana is very important to note, because it can be used as a basis in the development and promotion of tourism spatial perspective.

Advice that can be given is the cooperation on a variety of private, government and the community in supporting the development of tourism in Bali.

Key Words: Environment Design, Sustainable Tourism

I. PENDAHULUAN

Penataan Ruang dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi dikembangkan melalui ilmu teknik sipil dan perencanaan wilayah (*Planologi/ City and Regional Science*), dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Tata ruang sebagai ilmu interdisiplin tidak semata merupakan gabungan ilmu-ilmu yang sudah ada, tetapi mengenalkan perkembangan tata ruang sebagai ilmu yang bersifat multi dan metadisiplin;
2. Pola pikir yang menyeluruh dan terpadu yang dibawakan tata ruang, bersinggungan dengan pengetahuan manajemen, terutama dengan perkembangan manajemen perkotaan dan juga manajemen lingkungan hidup. Hal itu sejalan dengan perkembangan kebutuhan di Indonesia dalam merumuskan program pembangunan perkotaan, dimulai pembangunan prasarana perkotaan menggunakan pendekatan keterpaduan antarsektor, antarsumber pembiayaan dan antara perencanaan, pembiayaan, pembangunan fisik dan manajemen otonomi pemerintahan di daerah. Ini sejalan pula dengan perkembangan pengertian penataan ruang yang tidak lagi terbatas pada perencanaan tata ruang tetapi meliputi juga pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
3. Pola pikir menyeluruh dan terpadu dalam tata ruang bermanfaat untuk mewujudkan keterpaduan dan penanganan menyeluruh pengembangan kota dan wilayah.
4. Tata ruang mulai berkembang dari disiplin pengetahuan teknik sipil, kemudian perencanaan dan arsitektur, terakhir lahir sebagai disiplin ilmu yang bersifat metadisiplin. Namun pemikiran menyeluruh dan terpadu sebagai instrument pengambilan keputusan dapat tumbuh dari pemikiran para ahli dalam disiplin tunggal dan sektoral.
5. Penataan ruang tidak semata merupakan pengetahuan yang bersifat interdisiplin karena ada unsur 'pengetahuan' baru atau 'cara berpikir' baru yang melihat sesuatu permasalahan dalam konteks 'keseluruhan' yang memerlukan 'keterpaduan' yang diintroduksikan dalam penataan ruang, dan oleh karena itu penataan ruang disebut mempunyai ciri metadisiplin.

Terkait tata ruang kepariwisataan di Bali, masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pariwisata telah mengakibatkan menurunnya daya tarik objek wisata di Bali. Pola pengelolaan kawasan pariwisata yang tidak menyeluruh

(comprehensive) telah menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan menurunnya kualitas daya tarik objek wisata, misalnya timbulnya kerusakan lingkungan, meningkatnya urbanisasi ke lokasi obyek wisata yang telah meningkatkan permasalahan sosial antara lain meningkatnya tindak kejahatan dan kegiatan sektor informal yang tidak terkendali.

Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan kegiatan pariwisata. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mengakomodir prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan seperti yang tertuang dalam Pacific Ministers Conference on Tourism and Environment di Maldivest tahun 1997 yang meliputi kesejahteraan lokal, penciptaan lapangan kerja, konservasi sumber daya alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, dan *equity inter* dan antar generasi dalam distribusi kesejahteraan.

Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip di atas telah dielaborasi menjadi partisipasi, keikutsertaan para pelaku (stakeholder), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan wilayah yang bertujuan untuk mendukung beberapa prinsip di atas, yaitu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Penataan ruang tidak hanya memberikan arahan lokasi investasi, tetapi juga memberikan jaminan terpeliharanya ruang yang berkualitas dan mempertahankan keberadaan obyek-obyek wisata sebagai aset bangsa.

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable development guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk

memaparkan dukungan penataan ruang dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia khususnya Bali.

Pariwisata di daerah Bali merupakan sektor paling maju dan berkembang, Daerah ini memiliki obyek daya tarik wisata yang beragam, baik wisata alam, wisata sejarah maupun wisata budaya. Wisata alam, misalnya meliputi 47 obyek wisata, seperti panorama di Kintamani, Pantai Kuta, Legian, Sanur, Tanah Lot, Nusa Panida, Nusa Dua, Karang Asem, Danau Batur, Danau Bedugul, Cagar Alam Sangieh, Taman Nasional Bali Barat, dan Taman Laut Pulau Menjangan. Wisata budaya meliputi 83 obyek wisata, seperti misalnya wisata seni di Ubud, situs keramat Tanah Lot, upacara Barong di Jimbaran dan berbagai tempat seni dan galeri yang sekarang banyak bermunculan di beberapa tempat di Pulau Bali. Obyek wisata budaya ini sangat berkembang pesat, apalagi banyak karya seni yang dihasilkan oleh pelukis dan pematung dari Bali. Harga lukisan dan patung buatan Bali, harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan, ada beberapa pelukis asing yang sudah lama menetap di Bali, seperti Mario Blanko, Arie Smith, Rudolf Bonner dan sebagainya.

Bali sebagai salah daerah tujuan wisata di Indonesia, sangat ramai (1.386.448 orang tahun 2005) dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Konsekuensi dari tingginya tingkat kunjungan tersebut adalah meningkatnya pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata, seperti: hotel, *restaurant*, villa, biro perjalanan, usaha, dan jasa-jasa lainnya. Konsekuensi lanjutannya adalah meningkatnya kebutuhan akan energi listrik di Bali rata-rata 9,83 % per tahun (Bapeda Bali, 2004). Berdasar keterangan dari General Manager PLN Wilayah Bali Nusra yang berkedudukan di Denpasar, menyatakan bahwa kebutuhan listrik pada saat puncak mencapai 360 MW, sedangkan energi yang tersedia 453,8 MW yang disuplai dari: PLTG/PLTD Pesanggaran dengan kapasitas 120 MW, PLTG Gilimanuk dengan kapasitas 133,8 MW, dan jaringan interkoneksi Jawa-Bali dengan kapasitas 200 MW (adhika, 2010). Dampak ikutan dari tersedianya energi listrik adalah kawasan-kawasan potensial terutama yang dekat dengan kawasan pariwisata mulai berkembang, demikian seterusnya secara siklikal akan tetap berlanjut.

Pariwisata di Bali diharapkan dapat berkesinambungan dengan penataan ruang di Bali. Berdasarkan potensi alam atau pun buatan, Bali masih memiliki wilayah atau tempat yang memungkinkan untuk di kelola dan tata.

II. PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Dr. Ir. A. Hermanto Dardak

Mantan Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU (sekarang menjabat Wamen PU), dalam makalahnya berjudul Strategi Implementasi Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali dan Sumatera, menyampaikan beberapa permasalahan strategis dalam mengimplementasikan tata ruang di Pulau Jawa-Bali dan Sumatera, sebagai berikut :

- 1) Tidak meratanya persebaran penduduk sebagai *Human Capital* atau penggerak roda pembangunan, khususnya di wilayah Pulau Jawa-Bali dan Sumatera serta kesenjangan antar wilayah;
- 2) Kurangnya penyediaan dan kurang terintegrasinya pelayanan infrastruktur wilayah;
- 3) Tingginya alih fungsi (konversi) lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian, seperti industri, permukiman, prasarana umum dan lain sebagainya;
- 4) Kurang terkoordinasinya penanganan kawasan berfungsi lindung antara lain taman nasional, cagar alam, hutan lindung ;
- 5) Kurang terpadunya pengembangan prasarana yang mendukung sistem intermoda transportasi, karena didominasi oleh jalan raya yang volume lalu lintasnya tinggi dan berat (*overload*);;
- 6) Maraknya pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Pulau Sumatera dapat berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan, penyediaan sarana dan prasarana;
- 7) Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang,

Selanjutnya, terhadap permasalahan strategis tersebut, Dr. Ir. Hermanto Dardak menyampaikan serangkaian kebijakan dan strategi implementasi rencana tata ruang Pulau Jawa-Bali dan Sumatera.

2. Ir. Imam S. Ernawi MCM. MSc , Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dalam makalahnya berjudul “Peran Penataan Ruang Dalam Dimensi Nasional Dan Wilayah Perkotaan Sebagai Piranti Dalam Pemilihan Kebijakan Investasi Bidang Jalan”, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Diperlukan pendekatan pengembangan jaringan jalan yang berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pengembangan jalan harus dilakukan sesuai dengan skenario pengembangan kawasan yang tercantum dalam rencana tata ruang yang juga diarahkan untuk membuka kawasan-kawasan tertinggal agar kesenjangan wilayah dapat semakin dikurangi.
- 2) Pengembangan jaringan jalan tersebut pada dasarnya harus dilakukan secara terpadu dengan sektor-sektor lain dan diantara wilayah yang berdekatan sebagai bagian dari komitmen pengembangan wilayah nasional secara menyeluruh.
- 3) Untuk itu dalam mendukung pengembangan wilayah diperlukan konsistensi dalam menyelenggarakan penataan ruang, baik pada tingkat Nasional, Pulau, Provinsi, Kabupaten maupun Kota.
- 4) Dengan mengacu kepada rencana tata ruang, maka pengembangan jaringan jalan pada hakekatnya mendukung terwujudnya kerangka strategis penataan ruang Nasional, dimana jaringan jalan yang ada tidak saja berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan, tapi juga berperan untuk menyeimbangkan pengembangan kawasan, mengamankan teritorial dan sebagai perekat NKRI.

Tinjauan Budaya

Kebudayaan bukanlah merupakan suatu rangkaian kata yang sederhana yakni sebuah sistem yang mengorientasikan hubungan antara sesama manusia dan sekitarnya tetapi mengandung pula khasanah ideologi, yang sebagai akibatnya akan menimbulkan pertanyaan berupa: apa yang dicari serta untuk apa. Beberapa kajian tentang kebudayaan Bali telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar masih berkisar pada aspek antropologi

serta kurang menyentuh sisi yang paling dasar yakni arsitektur tradisional Bali itu sendiri. Meskipun arsitektur tradisional Bali memegang peranan yang sangat penting dalam komunitas dan budaya Bali (khususnya dalam tata ruang), masih sedikit yang berupaya untuk menggali potensinya lebih dalam.

Budaya tradisional di Bali memang tidak berubah secara dramatis. Pernyataan dari Bateson dan Mead serta Suryani dan Jensen dapat dipergunakan untuk mempelajari perubahan - perubahan dalam kebudayaan Bali. Meskipun Covarrubias dan Ramseyer berpendapat bahwa masyarakat Bali dapat berasimilasi dengan budaya baru serta menyatukannya dalam budaya tradisional (tanpa harus menghancurkan budaya tradisional itu sendiri), namun pergeseran budaya itu sendiri tetap terjadi, sehingga sedikit banyak telah mengubah tatanan yang ada.

Sejak dikembangkannya Bali menjadi daerah tujuan wisata dalam kurun dua dasa warsa belakangan ini, telah terjadi perkembangan yang sangat dinamis dalam hal kebudayaan, terlebih karena budaya yang dibawa oleh para pendatang telah ikut membentuk dan memberi warna dalam tata ruang di propinsi Bali.

Gubernur Bali saat itu, almarhum Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, mengeluarkan edaran yang meminta para pejabat di Bali memakai arsitektur Bali dalam pembangunan gedung-gedung pemerintah. Hal ini sebagai upaya untuk mengantisipasi tergesurnya seni dan budaya Bali dari pengaruh budaya luar. Beliau juga berinisiatif mengatur tata ruang dan ketinggian gedung (sempadan vertikal) hingga maksimal sampai 15 meter dari permukaan tanah. Para arsitek sejumlah hotel berbintang di Bali menjabarkan kebijaksanaan ini dengan jalan membangun gedung-gedung dan menata ruang sedemikian rupa sehingga mampu mencirikan pola arsitektur tradisional Bali yang sekaligus bisa memenuhi fungsi-fungsi perhotelan berstandar internasional. Meskipun kini banyak gedung - gedung dibangun dengan memakai pola arsitektur Bali, bangunan tersebut tetap tidak sama dengan gedung - gedung pada pola arsitektur tradisional Bali maupun konsep Tri Hita Karana yang sebenarnya.

Hal ini terjadi karena tinggi gedung, orientasi dan jarak antar gedung pada pola arsitektur tradisional Bali yang sebenarnya sangat tergantung pada letak dan fungsinya masing - masing. Gedung - gedung bernuansa Bali tersebut juga tidak dapat disebut

sebagai ukuran yang ringkas (compact) dari bangunan tradisional Bali yang sebenarnya, karena hampir serupa dengan bangunan modern biasa yang dikemas dalam ornamen - ornamen Bali. Karenanya, pemakaian arsitektur Bali dalam pembangunan gedung-gedung pemerintah belumlah dapat dikatakan sebagai upaya untuk mengantisipasi tergusurnya seni dan budaya Bali dari pengaruh budaya luar.

Tinjauan Terhadap Pola Pikir Tradisional

Dalam kehidupan sehari - hari, masyarakat Bali senantiasa percaya bahwa ada tiga faktor yang mesti dijaga keseimbangannya, yakni mikrokosmos (pribadi masing - masing orang), makrokosmos (alam semesta) dan Hyang Widhi (Tuhan). Konsep kesetimbangan hubungan di antara ketiga faktor ini disebut sebagai Tri Hita Karana. Mengacu pada konsep di atas, masyarakat Bali mengatur peruntukan suatu areal menjadi wilayah pawongan, palemahan dan parahyangan, berturut - turut untuk mikrokosmos, makrokosmos dan Hyang Widhi. Selain itu, wilayah dibagi pula berdasarkan pada arah hulu dan hilir. Wilayah hulu dinyatakan pada arah dimana matahari terbit atau dataran yang lebih tinggi berada (sebagai contoh bukit dan gunung). Sebaliknya, wilayah hilir diberikan pada arah dimana matahari terbenam atau pantai. Nordholt menyatakan bahwa fluida inilah yang diyakini bersirkulasi dari pegunungan yang suci menuju ke pantai, serta dari pantai akan kembali lagi ke gunung (sebagai angin dan hujan). Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa kehidupan di Bali merupakan pergerakan yang konstan dan berkesinambungan antara hulu dan hilir. Mengacu pada konsep Tri Hita Karana tersebut, desa - desa di Bali selalu menempatkan pura (tempat pemujaan) pada wilayah hulu, sedangkan tempat - tempat pembuangan diletakkan pada bagian hilir. Masyarakat Bali membuat perbedaan yang tegas antara wilayah pemukiman dan wilayah yang diperuntukkan bagi bangunan - bangunan umum, seperti halnya pura, wantilan dan pasar. Karenanya, sebuah desa merupakan satu kesatuan yang utuh dimana setiap individu adalah tubuh serta setiap institusi adalah organ tubuh itu sendiri. Prinsip orientasi bangunan terhadap arah hulu dan hilir inilah yang mengatur distribusi bangunan - bangunan suci dan perumahan pada daerah tradisional.

Tinjauan Terhadap Permasalahan yang Berkembang Pembangunan fisik yang banyak kita jumpai saat ini adalah berupa sarana transportasi, gedung - gedung bertingkat (baik untuk perkantoran, hotel - hotel, apartemen dan pertokoan), perumahan, serta taman wisata. Semua ini dibangun baik dengan memanfaatkan lahan kosong, lahan produktif maupun lahan yang sebenarnya berpotensi sebagai daerah penyangga. Meskipun propinsi Bali telah sukses meraih penghargaan Adipura, namun kriteria untuk menjadikan seluruh kota sebagai daerah yang nyaman belum tercakup di dalamnya. Justru sebaliknya, temperatur rata - rata di beberapa kota semakin meningkat dalam satu dasa warsa ini. Pencemaran juga menjadi persoalan yang berpengaruh terhadap kenyamanan penghuni, sehingga harus menjadi parameter penting dalam penataan kota. Konsep pembangunan di propinsi Bali memang sebaiknya ditinjau kembali. Pembangunan dan penataan kota nantinya dapat saja bersandar kepada nilai - nilai luhur tradisional yang telah teruji kebenarannya, namun sebelum melangkah lebih jauh perlu disadari bahwa arsitektur tradisional Bali selalu dikaitkan dengan aturan - aturan yang bersifat magis. Sebagai contoh, masyarakat umum selalu mengaitkan tempat - tempat suci dengan istilah - istilah sakral. Bagaimana masyarakat umum mendefinisikan serta menjabarkan istilah - istilah sakral tadi ditinjau dari konteks kekinian belum pernah dijabarkan dan diformulasikan. Belum ada yang mampu memberikan kajian mendalam ataupun menjabarkannya menjadi formula yang bisa diterima oleh seluruh komponen masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan mengapa arsitektur tradisional Bali -yang justru berperan banyak dalam komunitas masyarakat Bali- menjadi kurang atraktif dalam pembangunan modern sekarang ini, terlebih dengan terbatasnya lahan yang ada sehingga menyulitkan pembangunan gedung dengan pola arsitektur tradisional Bali yang murni.

Bila pembangunan di propinsi Bali kembali didasarkan pada nilai - nilai luhur tradisional Bali, satu pertanyaan yang akan muncul adalah: apakah keunggulan dari pola arsitektur tradisional bila dikaitkan dalam jaman modern dengan permasalahan yang semakin kompleks, khususnya bila ditinjau dari segi sosial, budaya, ekonomi, keamanan serta kenyamanan? Pertanyaan selanjutnya adalah: dapatkah pola - pola tradisional tersebut dijadikan baku standar dan disosialisasikan, seperti halnya pada negara - negara maju

yang senantiasa memiliki kodifikasi standar dalam pembangunannya? Bila kedua pertanyaan di atas dapat diberikan alasan yang tepat, maka kodifikasi bangunan selain sebagai upaya untuk menstandarkan pola bangunan, pola pembangunan dan pengembangan, ia sekaligus juga akan melestarikan bangunan - bangunan tradisional Bali itu sendiri.

Agar mampu menjadi suatu standar dalam pembangunan yang berkelanjutan, maka:

1. Konsep Tri Hita Karana -sebagai konsep keseimbangan dalam budaya dan masyarakat Bali- mampu menjadi acuan pembinaan, peningkatan pembangunan yang berkualitas, serta menjadi standar dalam pengembangan dan pembangunan, sehingga selain mencirikan nuansa Bali yang berwawasan lingkungan juga dapat menjadi acuan dalam pembangunan di dunia internasional.
2. Konsep Tri Hita Karana, sebagai suatu lokal genius Bali, mampu menggabungkan beberapa macam ilmu pengetahuan yang berkaitan erat dengan standar baku pembangunan dengan lebih mengedepankan konsep tradisional Bali, serta kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah - masalah yang ada maupun yang akan datang.
3. Konsep Tri Hita Karana mampu menjawab berbagai persoalan yang terbaru dan mampu mengantisipasi dampak teknologi dan perkembangan iptek terhadap budaya dan lingkungan.

Ada beberapa pemikiran yang melandasinya, yakni:

- 1) Sekalipun pembangunan dan pengembangan propinsi Bali lebih menitik beratkan pada nilai - nilai luhur tradisional, namun diupayakan agar tidak bersifat sektarian dan primordial, tetapi cenderung pada budaya multikultural dan pluralistik, hingga sanggup menampung budaya Bali yang terus menerus berproses dan berkembang.
- 2) Penataan kota - kota dan pola pembangunan dengan metoda yang sektarian cenderung akan menjadikan kota - kota dan pola pembangunan tersebut semuanya harus berdasar pada arsitektur Bali. Budaya multikultural dan pluralistik yang dimaksudkan adalah budaya dimana ada proses sinkretisme, inkulturasi serta asimilasi kultural dalam perkembangannya, sehingga akan dihasilkan budaya kekinian yang dapat diterima dan dirasakan oleh semua pihak, yang dapat terus mengantisipasi perkembangan itu sendiri.

- 3) Penataan dan pengembangan seluruh sub-sistem yang meliputi semua sarana dan prasarana untuk mendukung pemakaian konsep Tri Hita Karana secara professional, serta terus - menerus menggali dan melaksanakan penelitian tentang konsep tersebut secara optimal.
- 4) Kontribusi ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan konsep - konsep terbaru yang memiliki relevansi yang kuat demi terwujudnya upaya untuk menjadikan konsep Tri Hita Karana sebagai suatu standar pembangunan di Bali.
- 5) Pemberdayaan sumber daya yang ada secara efektif dan penerapan sistem perbaikan kualitas secara kontinyu di segala sektor dengan menggunakan langkah - langkah terprogram, untuk menjadikan konsep Tri Hita Karana sebagai dasar pembangunan di Bali.
- 6) Upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam penelitian dan pengembangan konsep Tri Hita Karana, sehingga dapat disosialisasikan kepada masyarakat.
- 7) Memberikan informasi tentang orientasi pengembangan teknologi dan iptek di Bali dalam pembangunan jangka panjang, penelitian tentang pembangunan dan pengembangan Bali, baku mutu standar dalam upaya mengembangkan konsep Tri Hita Karana sebagai suatu standar baku pembangunan di Bali, pemahaman sosial, budaya dan perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan upaya pengembangan konsep Tri Hita Karana sebagai suatu standar baku pembangunan di Bali, pemahaman informasi dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemakaian dan upaya mengembangkan konsep Tri Hita Karana sebagai suatu standar baku pembangunan di Bali.

Tipe Pembangunan Pariwisata Di Indonesia atau di beberapa negara lain biasa dikenal dua tipe pembangunan pariwisata berdasarkan pada pola, proses dan tipe pengelolaannya, yaitu : tipe tertutup (“enclave”) atau terstruktur dan tipe ke dua yaitu tipe terbuka (“spontaneous”) atau tidak terstruktur. Ke dua tipe ini pada umumnya mempunyai perbedaan yang jelas dalam hal karakteristiknya, terutama pada pola, proses dan tipe pengelolaannya. Tipe tertutup atau terstruktur dapat diambil contoh seperti kawasan pariwisata Nusa Dua di Bali, yang diakui telah berhasil membangun

dan mengembangkan tipe kawasan pariwisata tertutup. Sedangkan untuk tipe terbuka atau tidak terstruktur dapat diambil contoh pada daerah daerah pariwisata di Indonesia yang perkembangannya spontan, seperti kawasan pariwisata Sanur dan Kuta. Tipe tertutup atau terstruktur pada dasarnya ditandai oleh karakter-karakter sebagai berikut:

- Pada umumnya kawasan ini dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini memang tidak didesain untuk tujuan utama pada keuntungan penduduk lokal. Tipe kawasan seperti ini akan mempunyai kelebihan dalam kekuatan kesan yang ditumbuhkan sehingga mampu menembus pasar internasional.
- Lokasi biasanya terpisah dari masyarakat/penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan mudah untuk dimonitor/dikontrol. Karena itu pengaruh sosial budaya yang ditimbulkan dari pariwisata terhadap penduduk lokal dapat terdeteksi sejak dini.
- Lahan pada umumnya terbatas, sehingga kawasan pariwisata biasanya tidak terlalu besar, sehingga masih berada pada tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinir, dan akan mampu menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana secara internasional. Hal ini akan berfungsi sebagai struktur utama dalam mengembangkan fasilitas yang berkualitas tinggi yang pada umumnya diperuntukkan untuk kalangan internasional yang berduit. Tipe ini tentunya akan membawa iklim “harga tinggi” dengan harga-harga yang ditawarkan di dalam kawasan ini tidak akan terjangkau oleh penduduk lokal.

Tipe terbuka atau terstruktur yang bersifat spontan pada umumnya ditandai dengan karakter-karakter sebagai berikut :

- Tumbuh menyatu dengan struktur kehidupan baik ruang maupun pola masyarakat lokal.
- Distribusi pendapatan yang diperoleh dari wisatawan bisa secara langsung dinikmati oleh penduduk lokal.

- Dampak perkembangan pariwisata terutama dampak negatifnya menjalar dan menyatu dengan cepat ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit di monitoring/dikontrol.
- Kalau ingin mengetahui tipe mana yang lebih baik dari ke dua tipe pembangunan pariwisata tersebut, sangat tergantung dari sudut pandang kita walaupun diketahui masing-masing tipe pengembangan pariwisata ini sedikit tidaknya sangat tergantung dari karakteristik lokasi pariwisata itu dikembangkan. Kalau hanya dengan pertimbangan karakteristik lokasi, baik fisik, maupun sosial-budaya kita sebetulnya sudah dapat menentukan tipe mana yang lebih cocok dikembangkan di lokasi tersebut. Akan tetapi, sering kebijaksanaan yang diambil sering tidak hanya memperhatikan hal tersebut, walaupun banyak pihak yang harus dikorbankan. Kalau dicermati tujuan pembangunan pariwisata tersebut, untuk siapa sebetulnya pembangunan itu dilakukan, maka pertimbangan-pertimbangan untuk kepentingan masyarakat harus lebih dikedepankan.



2.1 Inovasi Yang Dapat Dilakukan Dalam Pengembangan-Pengembangan Parwisata

A. Terobosan Inovatif Bagi Pariwisata Pegunungan Berbasis Komunitas Masyarakat Berupa Perencanaan, Pemantauan, dan Penilaian.

- a. Perencanaan, pemantauan dan penilaian harus berkelanjutan
- b. Perencanaan harus dimulai pada tingkat lapangan (orientasi lapangan), dengan masyarakat lokal sebagai peserta utama yaitu untuk fungsi kontrol.
- c. Kerangka waktu yang panjang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pariwisata gunung berbasis masyarakat

1. Strategi Pariwisata Lokal

- a. Mengacu pada prinsip dimana benefit pariwisata ini dapat dinikmati secara merata.
 - b. Strategi berfokus hanya pada bagian perubahan yang mana saja yang ingin dicapai
- Contoh studi kasus Ghale Kharka-Siklis Proyek Pengembangan Ekowisata.

2. Perencanaan Pariwisata Regional

Perencanaan ini mencakup kawasan yang lebih luas termasuk sumber daya kebudayaan, permodalan dan kontrol yang lebih luas lagi, dengan tujuan untuk mencapai :

- a. Menciptakan lingkungan yang kompetibel
- b. Mempermudah dalam menghadapi situasi politik
- c. Meningkatkan persatuan dalam menghadapi persaingan
- d. Meningkatkan pangsa pasar dengan produk diversifikasi
- e. Mempermudah distribusi barang dan informasi
- f. Meningkatkan kontrol terhadap kualitas dengan cara standarisasi

Contoh studi kasus Regional Collaboration of Czech Inspiration, Czech Republic.

3. Strategi Pengembangn Pariwisata Nasional

Strategi pengembangan pariwisata pegunungan merupakan salah satu kebijakan pariwisata nasional yang terkait dengan usaha konservasi, pelestarian warisan budaya dan pembangunan ekonomi sosial. Strategi ini sering menggunakan lembaga swadaya masyarakat dan suara dari masyarakat bawah dalam pelaksanaannya.

4. Studi Dampak Ekonomi dan Sosial

Untuk mengetahui dampak ekonomi yang berhubungan dengan manajemen finansial, biaya. Cara yang digunakan adalah kisioner dan analsis keuangan . namun studi ini memiliki kelemahan yaitu tidak terhubung dengan aspek sosial budaya

5. Menyediakan Informasi kepada Masyarakat Lokal dan Para Praktisi

Dalam tahap perencanaan segala keputusan harus dapat diinformasikan pada masyarakat tentang segala perubahan yang terjadi, sehingga tidak terjadi jurang yang membuat perbedaan persepsi.

6. Memonitor Parameter, Indikator, dan Check List

Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dari prinsip dan rencana awal. Proses monitoring sangat penting dalam pariwisata pegunungan untuk menjadi hubungan proses konservasi dengan dunia usaha. Ada beberapa indikator yang dipergunakan antara lain:

- a. Tingkat keberhasilan Reproduksi suatu spesies.
- b. Tingkat erosi yang disebabkan oleh pariwisata
- c. Tingkat daya tampung jalan raya untuk kendaraan
- d. Tingkat kepuasan konsumen

- e. Daya tarik suatu tempat
- f. Tingkat polusi

Setiap indikator yang diperoleh didokumentasikan untuk menjadi data pembandingan. Disamping itu perlu juga dokumentasi visual berupa foto (foto tingkat erosi).

Infrastruktur

Infrastruktur yang terdiri dari fasilitas fisik dasar yang berguna bagi pariwisata pegunungan berbasis masyarakat untuk menjalankan fungsinya, meliputi gedung, akses jalan, pembangkit energi, pengolahan limbah. Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sosial melalui pelatihan, komunikasi dan penyebaran informasi.

Kemudian muncul tantangan bagaimana cara agar pembangunan infrastruktur tidak berpengaruh negatif terhadap budaya lokal dan lingkungan pegunungan yang rentan? Dari hasil diskusi Akthar dan Karki menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur baru bisa menjadi media untuk menjaga kelestarian budaya lokal dan memperbaiki dampak negatif ekonomi yang ditimbulkan dari pariwisata pegunungan .

B. Taman Wisata Alam Yang Dapat Dikembangkan

Secara yuridis pengertian taman wisata alam dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan, salah satunya dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 16, UU No. 5 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa “Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.” Status taman wisata alam sebagai bagian dari kawasan pelestarian alam juga dapat ditemukan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun yang menyatakan bahwa:

Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari:

- a. Taman nasional
- b. Taman hutan raya
- c. Taman wisata alam

Kawasan pelestarian alam menurut struktur pola penataan ruang merupakan bagian dari kawasan lindung, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:

Kawasan lindung mencakup:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam;
- e. Kawasan lindung geologi;
- f. Kawasan lindung lainnya

Dengan demikian taman wisata alam merupakan bagian dari kawasan lindung. Dalam kedudukannya sebagai kawasan lindung, kawasan taman wisata alam berdasarkan Pasal 85 ayat (1) huruf a Perda Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, bunyi Pasal 80 ayat (1) huruf a yang menetapkan kawasan taman wisata alam sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e, mencakup:

- a. Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Jembrana dan Buleleng, Kawasan Taman Hutan Raya Prapat Benoa (Ngurah Rai) di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Taman Wisata Alam (TWA) Daratan yang mencakup TWA Danau Buyan-Tamblingan di Kabupaten Buleleng, TWA Batur-Bukit Payung dan TWA Penelokan di Kabupaten Bangli, TWA Sangeh di Kabupaten Badung; TWA Bawah Laut di Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung, TWA Bawah Laut Pulau Menjangan di Kabupaten Jembrana, Cagar Alam atau Hutan Lindung Batukaru di Kabupaten Tabanan;

Adapun kriteria taman wisata alam tersebut sehingga ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berdasarkan Pasal 90 adalah sebagai berikut:

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan aset daerah berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem;
- c. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- d. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;
- e. memberikan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam; dan
- f. memberikan perlindungan terhadap daerah pesisir.

Terhadap Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, diperlukan strategi untuk dapat melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dari kawasan tersebut, adapun strategis pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:

- a. menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung;
- b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- d. membatasi pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya intensif;

1. TWA Sangeh

Taman Wisata alam Sangeh terletak di desa Sangeh, kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Status kawasan ini sebelumnya adalah cagar alam, namun dengan terbitnya Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: II/Kpts-II/1993 tanggal 16

Februari tahun 1993 berubah menjadi taman wisata alam dengan luas 13.969 Ha. Daya tarik objek TWA sangeh adalah adanya kehidupan kera abu-abu, kemudian terdapat tegakan murni pohon Pala yang sangat khas dan mendominasi kawasan tersebut, selain itu terdapat pula bangunan pura dalam kawasan tersebut, seperti Pura Bukit Sari dan Pura Melanting.

2. TWA Penelokan

Taman Wisata Alam Penelokan terletak di Desa Penelokan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang masuk dalam Register Tanah Kehutanan (RTK) 8 Hunung Abang-Agung. Status kawasan ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 655/Kpts/Um/10/1978 tanggal 29 Oktober 1978 dengan luas 574.275 Ha. Kawasan taman wisata alam ini terletak diketinggian antara 1.200-1.500 m dpl dengan udara yang sejuk dan mempunyai panorama yang sangat indah dan unik karena dari kawasan ini dapat dilihat keindahan Gunung Batur dan Danaunya. Apabila udara cerah, dapat pula dilihat puncak Gunung Agung yang menjulang di sebelah tenggara.

3. TWA Gunung Batur Payang

Taman Wisata Gunung Batur Bukit Payang terletak di desa Penelokan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Status kawasan ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:321/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 Nopember 1982 dengan luas 2.075 Ha. Kawasan taman wisata ini memiliki udara yang sejuk, panorama yang indah dan unik karena dari kawasan ini dapat dilihat keindahan Gunung Batur dan danaunya.

4. TWA Laut Nusa Lembongan dan TWA Laut terdapat di Kawasan

Taman Nasional Bali Barat Daya Tarik dari taman wisata alam ini adalah pasirnya yang putih, airnya bersih dan jernih, dan merupakan tempat yang bagus untuk menyaksikan keindahan matahari terbenam. Aktivitas wisata laut yang bisa dilakukan di TWA ini adalah, kano, banana boat, bahkan diving dan snorkeling dimana terdapat ratusan ikan warna-warni, gundukan batu karang putih, hingga rumput laut, terlihat memesona di kedalaman laut yang jernih

III. PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa peraturan tata ruang dan aspek-aspek kebudayaan seperti Tri Hita Karana sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan yang mendasar dalam mengembangkan kepariwisataan yang nantinya dapat dikembangkan secara berkelanjutan
2. Dengan adanya beberapa inovasi kepariwisataan tersebut, Bali secara potensial baik alami dan atau buatan masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih baik lagi, dengan berbagai perencanaan yang lebih tertata dan terorganisasi dengan baik.

B. Saran

1. Kepada seluruh *stake holder* baik swasta atau pun pemerintah daerah agar intensitas berkomunikasinya ditingkatkan guna mengangkat dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki di Bali. Dan mengupayakan kontribusi masyarakat dalam rencana tata ruang wilayah Bali.
2. Agar semua pihak memiliki rasa memiliki yang besar sehingga dapat mengelola potensi yang dimiliki dengan lebih baik tanpa merusak atau mengganggu keaslian atau kemurnian dari potensi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Danusaputro, St. Munajat, 1980, Hukum Lingkungan, Buku V;Sektoral jilid 5, Binacipta, Bandung.
- Dunn, William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi kedua, Alih oleh Samodra Wibawa dkk, Gadjah Mada University Press: Jogjakarta.
- Ekatjahjana, Widodo, 2008, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Teknik Penyusunannya, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erwin, Muhamad, 2008, Hukum Lingkungan, dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung.
- Fatmawati, 2005, Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Faure, Michael and Niessen, Nicole, Editor, 2006, *Environmental Law in Development, Lessons from the Indonesian Experience*, Edward Eglar Publishing, USA.
- Ginther, Konradet.all., Editor, 1994, *Sustainable Development and Good Governance*, Martinus Nijhoff Publisher, London.
- Hardjosoemantri, Koesnardi, 1994, Hukum Lingkungan, Cet.2, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hoesein, Zainal Arifin, 2009, *Judicial Review Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.W.R. Wade, 1986, *Administrative Law, Fifth Edition*, Oxford University Press, Walton street.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku I*; Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Joeniarto, 1979, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Alumni, Bandung.
- Islamy, Irfan, 2007, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Nugroho, Heru, 2001, *Negara Pasar dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar: Jogjakarta.
- Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Radjab, Dasril, 1994, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tatanegara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum lingkungan dan Kebijakan Publik*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Riant Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implentasi dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Ridwan, 2007, *Implementasi kebijakan penataan pedagang Kaki Lima Jalan Urip Sumoharjo Kota Jogjakarta*, Tesis Program Studi Sosiologi, Pascasarjana UGM, tidak dipublikasikan.
- Ridwan, H. Juniarso dan Sodich, Achmad, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa Bandung.
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar: Jogjakarta.
- Suradnya, I Made, *Analisis Faktor-Faktor Daya Tarik Wisata Bali Dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali*, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Wahab, Solihin Abdul, 1997, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.